

B U L E T I N
SKRIP7A

ISSN : 0252-2855

Vol. 1. No.1 – Desember 2004

EDISI T K S

Kekerasan dalam Rumahtangga dan Antisipasinya

Dra. Rosalia Indriyati S. 1 – 14

**Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Manusia**

Dra. Chr. Rini Suharsih 15 – 29

Informed Consent ditinjau dari Aspek Hukum

M.L. Lusi Nilawati 30 - 45

Upaya Anak Jalanan Untuk Bertahan Hidup

Dra. Lucia Sri Peni B.N. 46 - 63

**Membangun Budaya Kerja di Lingkungan Perguruan
Tinggi bagi Pertumbuhan Kualitas
Sumberdaya Manusia**

Dra. M.G. Rochsionsih 64 – 83

Pembangunan Sosial dan Masyarakat

Yustina Pratiwi, S.S. 84 – 105

**AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL
TARAKANITA
YOGYAKARTA**

Pengantar Redaksi

Pembaca Budiman.

Dalam Skripta edisi Teknologi Kesejahteraan Sosial (TKS) Desember 2004 ini akan disajikan enam artikel menarik, yang tentu saja akan bisa menambah wawasan bagi kita semua.

Relasi timpang antara suami dan istri bisa mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Ketidak-setaraan antara suami dan istri menyebabkan timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga. Disamping itu bias gender yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat kadang membuat kita merasa tabu untuk mengupas dan menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut, meskipun hal itu telah terjadi dan dialami selama bertahun-tahun. Benarkah demikian ?, apakah tidak mungkin lagi untuk diatasi ?. Temukan jawabannya dalam artikel “ Kekerasan dalam Rumah tangga dan Antisipasinya” tulisan Rosalia Indriyati.

Pembangunan dewasa ini banyak mengalami keberhasilan terlihat adanya kemajuan yang terjadi di banyak sektor. Namun kadang pembangunan kurang memperhatikan kesejahteraan generasi penerus terutama dari sisi pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Upaya-upaya dan kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menjaga dan mengupayakan kelestarian lingkungan hidup ?. Simak uraian selengkapnya tulisan Rini Suharsih dalam “ Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Manusia”

Pada waktu lampau hubungan dokter dan pasien bersifat paternalis. Dokter sebagai subyek yang sangat menentukan sedangkan pasien hanyalah obyek yang harus tunduk dan manut kepada dokter selaku subyek, namun dewasa ini tak lagi demikian. Dokter dan pasien mempunyai kewajiban yang masing-masing harus dijalankan dengan baik, sementara hak dari masing-masing juga harus dihormati satu sama lain. Bagaimana kedua hal tersebut ditinjau dari sisi hukum ?, akan dikupas secara jelas oleh Lusi Nilawati dalam tulisannya yang berjudul “ Informed Consent Ditinjau dari Aspek Hukum”

Upaya untuk dapat bertahan hidup dengan layak pada saat ini terasa berat, apalagi bagi anak-anak jalanan. Dimana mereka sering kurang

mendapatkan tempat untuk bisa menikmati hidup dengan leluasa dan dipandang negatif oleh sebagian masyarakat. Padahal menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan hidup yang sebenarnya. Simak kupasan mengenai “Upaya Anak Jalanan untuk Bertahan Hidup” tulisan dari Lucia Sri Peni.

Membentuk pribadi yang serba bisa, cakap secara intelektual, terbuka untuk pertumbuhan, religius, cenderung berbuat adil, serta menjadi pemimpin yang mengikuti suara hati, merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi dalam mempersiapkan para lulusannya. Untuk dapat merealisasikannya tentunya harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. ikuti paparan MG. Rochsionsih dalam “Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perguruan Tinggi”

Pembangunan sosial masyarakat telah dimulai sejak abad ke sembilan belas. Pembangunan terus mengalami perubahan dan kemajuan, bahkan pandangan-pandangan mengenai pembangunan juga selalu mengalami perkembangan. Sebagai artikel penutup dalam edisi Teknologi Kesejahteraan Sosial ini akan disajikan terjemahan oleh Yustina Pratiwi yang berjudul “Pembangunan Sosial dan Masyarakat”.

BULETIN SKRIPTA



Pelindung

Direktur AKS Tarakanita

Penanggungjawab/Pimpinan Redaksi

F.L. Dwi Widada, S.TP.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. James Spillane, S.J.

Dr. M. Dwi Marianto, M.F.A.

Drs. C. Pramuwito

H.A. Purnawijayanti, M.P.

Redaksi Pelaksana

Herry Martono F.

Widada

Distribusi

Tata Usaha AKS Tarakanita

Yogyakarta

Alamat Redaksi

Jl. Tantular, Pringwulung, PO. Box. 1267

Yogyakarta 55012, Telp. (0274) 514250

Fax. (0274) 512494

E-mail : akstara@yahoo.com

Diterbitkan Oleh

UPT Penerbitan AKS Tarakanita

Yogyakarta

ISSN : 0852 – 2855

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ANTISIPASINYA

Rosalia Indriyati Saptatiningsih

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena relasi timpang antar suami dan istri, dimana terjadi pemusatan kekuasaan pada laki-laki. Sehingga laki-laki yang berkuasa cenderung mengontrol istri sebagai manusia yang dikuasai. Situasi semacam ini menciptakan kecenderungan posisi laki-laki dengan perempuan dalam posisi hirarkhis.

Ketidak setaraan kekuasaan antara suami istri menyebabkan timbulnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang sudah lama terbentuk dalam budaya patriarkhi. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak secara otomatis merubah relasi antar manusia yang masih berada pada konstruksi sosial yang bias gender.

Permasalahan sehari-hari yang bias gender banyak terjadi dalam masyarakat, hal tersebut dampaknya luar biasa, karena telah berlangsung puluhan tahun, akhirnya diyakini sebagai hal biasa terjadi dalam rumah tangga. Bahkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, masih diyakini sebagai persoalan pribadi, yang dianggap tabu / tidak boleh diketahui oleh pihak lain.

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemecahan masalah, melalui analisis persoalan sehingga akan nampak jelas apa yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta mengetahui bagaimana mengantisipasi agar persoalan tersebut tidak berkembang dalam masyarakat kita.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi didengungkan di bumi Indonesia ini, gaung penegakan untuk hak asasi manusia (HAM) semakin berkumandang untuk selalu diperjuangkan oleh beberapa kelompok swadaya masyarakat maupun perorangan. Untuk lebih serius dalam penanganan tentang persoalan HAM di Indonesia bahkan sudah ada lembaga resmi yang secara khusus menangani permasalahan HAM, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Bentuk pelanggaran HAM biasanya adalah "kekerasan" yang menyebabkan ketidakadilan seperti yang dijalankan oleh pemerintah orde baru melalui alat-alatnya, yakni militer, hukum, informasi dan ideologi, yang tidak jarang juga didukung oleh budaya. Meskipun orde reformasi sudah memasuki tahun ke 6 namun budaya kekerasan belum hilang, bahkan sering kita lihat melalui informasi elektronik (TV dan Radio) juga melalui media cetak, peristiwa kekerasan aparat pemerintah terhadap warga sipil dalam menangani kasus-kasus demonstrasi, penggusuran dll. Banyak pula kekerasan yang dialami para pekerja rumah tangga akibat penganiayaan dari majikannya.. Dua contoh tersebut menunjukkan kekerasan penindasan dari orang yang "berkuasa" terhadap yang dikuasai. Sistem dan struktur yang tidak adil tersebut sulit diubah dalam waktu dekat, karena telah tertanam melalui budaya patriarki. Oleh karena itu perjuangan menuju keadilan masih membutuhkan waktu yang panjang. Dari berbagai bentuk pelanggaran HAM, kekerasan terhadap istri dan anak yang terjadi dalam rumah tangga belum dijadikan sebagai perhatian pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini sebenarnya merupakan masalah sosial yang serius, dan mendapat perhatian dan tanggapan serius dari masyarakat dan pemerintah, hal ini tercermin dari telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Anti KDRT) menjadi Undang-Undang no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus-kasus kekerasan terhadap istri dan anak tidak terungkap secara

terbuka, karena ada anggapan bahwa rumah tangga sebagai institusi yang merupakan wilayah pribadi. Korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan atau istri dan anak-anak.

Sebagian besar masyarakat berpendapat permasalahan yang terjadi antar suami dan istri, merupakan urusan rumah tangga yang nota bene merupakan urusan pribadi, yang tidak boleh disentuh atau diketahui oleh orang/pihak lain. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga jika mengeluh pada pihak lain, dianggap sebagai mencoreng nama keluarga dan dirinya sendiri.

Namun saat ini sudah banyak yang memperjuangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perhatian secara serius dari pemerintah. Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004 sekitar 300 ibu dan remaja putri menuntut Presiden Megawati segera mengeluarkan amanat untuk segera mengesahkan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah tangga.. Hal tersebut layak untuk diperhatikan mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Muhamad Rezfah Omar, SH dari Divisi pelayanan Hukum Asosiasi Perempuan Lemabaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH Apik), menyebutkan selama tahun 2000 ada 496 kasus, tahun 2001 ada 568 kasus, tahun 2002 ada 884 kasus dan tahun 2003 sebanyak 868 kasus. (Kompas, 4 Mei 2004:37) Sedangkan data dari Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS.Cipto Mangunkusumo, Jakarta, menunjukkan tahun 2000 ada 68 korban KDRT yang datang minta pertolongan ke PKT dan berturut-turut setiap tahun menjadi 105 kasus, 106 kasus dan 45 kasus tahun 2003. Data Women's Crisis Centre Mitra Perempuan sejak tahun 1997 menyatakan, korban KDRT yang ditangani adalah 64 kasus, 101 kasus, 113 kasus, 232 kasus, 258 kasus, 226 kasus hingga desember 2002 (Kompas, 1 juni 2004:17). Data tersebut merupakan fakta jumlah korban KDRT yang melapor, hampir bisa dipastikan jumlah perempuan korban kekerasan yang tidak melapor lebih besar lagi karena kekerasan dalam rumah tangga oleh banyak orang masih dipandang sebagai masalah privat yang bukan kriminal.

Melihat realita yang terjadi dalam masyarakat tersebut, perlu adanya penyadaran bahwa KDRT merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian maka sekarang persoalannya adalah bagaimana agar

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diantisipasi untuk tidak semakin berkembang dalam masyarakat, sehingga budaya menghargai hak-hak manusia semakin tumbuh di hati setiap insan manusia Indonesia khususnya .

Penyebab terjadinya kekerasan

Semua orang mencita-citakan hidup aman dan sejahtera, akan tetapi kenyataan yang dihadapi justru menunjukkan kebalikkannya. Dimana-mana terjadi pertengkaran, pertikaian dan peperangan. Kekerasan merupakan cerita dan gambaran yang setiap hari disajikan melalui surat kabar, TV, radio dan media lainnya. Kasus pembunuhan, perkosaan, penganiayaan terjadi dikalangan manapun dapat kita lihat setiap hari melalui layar kaca (TV), korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak dan mereka yang lemah. Di antara manusia terjadi diskriminasi jenis kelamin, warna kulit, status sosial, suku, dan ras. Mereka yang kecil atau lemah tersingkir ke pinggiran atau termarginalkan. Pemaksaan dan penindasan telah membuat anggota masyarakat yang menjadi korban merasa tertekan. Hidup dalam kekerasan akan mendorong seseorang melakukan kekerasan pula.

Sejarah kekerasan terhadap perempuan dimulai dari sejarah umat manusia itu sendiri. Pada awalnya laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara biologis antara laki-laki dan perempuan memang berbeda, kemudian hal tersebut menghasilkan artikulasi kultural yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Sebenarnya perbedaan gender tidak menjadi masalah, jika tidak menghasilkan ketidakadilan. Permasalahannya adalah perbedaan peran yang dimulai dari perbedaan biologis memunculkan konsep laki-laki lebih unggul dari pada perempuan . Hal tersebut berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga relasi antara manusia perempuan dan laki-laki menjadi tidak setara, dan perempuan berada pada posisi subordinat.

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani (Nunuk.P,2004 : 222).

Menurut Fakih (1999: 17), kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi(*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satunya kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender – related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Kekerasan merupakan tindakan yang terjadi dalam relasi antar manusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban juga harus dilihat posisi relasinya. Dalam hubungan dengan masyarakat seperti ini, kelompok yang berada dalam posisi di atas sangat potensial melakukan tindak kekerasan atau penindasan kelompok di bawahnya. Struktur dominasi ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti dalam aspek ekonomi (kaya-miskin, majikan-buruh), aspek sosial politik (pemimpin dan yang dipimpin, pemerintah-rakyat), aspek religius (agamaan-awam), aspek usia (tua-muda, orang tua-anak-anak), aspek sosial budaya (kota-desa, pandai-bodoh) dan aspek jenis kelamin (laki-laki-perempuan, perempuan/laki-laki, jenis kelamin yang lain, waria) (Nunuk.P,2004:223).

Begitu mengakarnya nilai-nilai budaya patriarkhi dalam masyarakat telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, dengan relasi timpang antara perempuan dan laki-laki. Sehingga nilai-nilai tersebut menciptakan dikotomi yang beranggapan bahwa laki-laki sebagai makhluk yang superior dan perempuan pada posisi inferior.

Salah satu faktor permasalahan sosial yang berdampak negatif dalam keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Hampir semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh laki-laki. Dalam analisa penelitian yang dilakukan di SEHATI, mencari faktor-faktor yang melatar belakangi baik perempuan maupun laki-laki yang mungkin meningkatkan resiko seorang perempuan secara fisik dan seksual dianiaya oleh suaminya. Pendidikan yang rendah merupakan satu-satunya karakteristik di antara perempuan yang ditemukan meningkatkan risiko kekerasan oleh pasangan. Kekerasan juga selalu dihubungkan dengan tingkah laku pengontrolan oleh pihak suami. Sebagai contoh laki-laki yang menggunakan kekerasan terhadap istrinya lebih cenderung untuk lebih mencurigai bahwa istrinya tidak setia, mudah marah jika istrinya berbicara dengan laki-laki lain dan melarang istrinya bertemu dengan temannya. Faktor lain juga adanya budaya yang telah di tanamkan sejak berpuluh-puluh tahun bahwa laki-laki adalah kepala keluarga atau ada yang mengatakan laki-laki sebagai panglima dalam keluarga, sehingga yang punya keputusan dan mengatur kehidupan keluarga adalah di tangan laki-laki (ayah).

Hasil serupa ditemukan di negara lain seperti Kanada, Nicaragua dan Kamboja, temuan ini memberi kesan bahwa tindak tanduk kekerasan tidak hanya sebagai kemarahan yang terkontrol, tetapi laki-laki pelaku kekerasan lebih percaya bahwa mereka berhak mengontrol seluruh aspek kehidupan istrinya dan menggunakan kekerasan fisik atau seksual sebagai cara untuk menghukum mereka bagi "ketidak patuhan" mereka (Hakimi, dkk 2001: 62).

Jika dalam keluarga anak-anak perempuan melihat ayahnya melakukan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun mental terhadap ibunya terus-menerus dan si ibu tanpa perlindungan, maka anak tersebut akan merasa bahwa perlakuan demikian merupakan hal yang wajar. Demikian pula terhadap anak laki-laki kelak juga akan meniru perlakuan ayahnya dalam memperlakukan perempuan /istrinya kelak. Hal ini dapat disebut "penularan kekerasan antar generasi" (*intergenerational transmission of violence*).

Di seluruh dunia, berbagai penelitian telah mengidentifikasi suatu kecenderungan yang konsisten tentang kejadian yang dapat disebut sebagai "pemicu" terjadinya kekerasan terhadap istri.

Kejadian tersebut antara lain : tidak patuh pada suami, tidak menyediakan makan tepat pada waktunya, tidak mampu merawat anak-anak atau rumah dengan baik, menanyai suami bagaimana ia menggunakan uangnya, menanyai suami tentang pacar/WIL-nya, pergi tanpa ijin suami, menolak berhubungan seks dengan suami, mencurigai suami. Semua itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap peran gender “dominan” yang melekat pada suami. (Hakimi, dkk, 2001:67)

Korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah istri, anak anak dan pekerja rumah tangga (sebagian pekerja rumah tangga adalah perempuan). Kekerasan akan abadi dalam rumah tangga jika perempuan sebagai korban tidak mau berbicara, karena merasa bahwa permasalahan keluarga harus dijaga kerahasiaanya.

Bentuk-Bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. Kekerasan seksual, yaitu perkosaan terhadap perempuan, termasuk jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Hal ini juga dapat terjadi dalam keluarga dan dapat dialami oleh istri, anak perempuan ataupun pekerja rumah tangga . Ketidak relaan ini kadang tidak nampak karena korban merasa takut, malu, terpaksa karena status sosial dan ekonomi maupun kultural, sehingga korban tidak ada pilihan lain..
2. Kekerasan fisik, yaitu tindakan untuk menyakiti secara fisik terhadap istri, anak maupun pekerja rumah tangga, seperti pemukulan, menampar, dan serangan fisik lainnya, juga penyiksaan terhadap anak-anak.
3. Kekerasan psikologis, yaitu tindakan merendahkan kemampuan istri, ancaman, mencela, menghina, bicara kasar, manipulasi, eksploitasi, dan sikap melindungi yang berlebihan sehingga dirasakan sebagai larangan/kekangan.

4. Kekerasan sosial dan budaya kedudukan suami sebagai kepala keluarga meligitimasi untuk merendahkan kedudukan istri dalam keluarga seperti dalam pengambilan keputusan perempuan tidak dilibatkan, jenis pekerjaan perempuan diatur, perempuan pergi malam dilarang.
5. Kekerasan ekonomi yaitu pekerjaan domestik perempuan dianggap tidak ada nilai ekonominya, penjatahan uang belanja, melarang perempuan bekerja tetapi menelantarkannya. Sementara istri yang boleh bekerja publik hanya dihargai sebagai pencari nafkah tambahan, meskipun gaji istri lebih tinggi dari suami.
6. Kekerasan yang menyangkut kesehatan reproduksi perempuan, yaitu pemaksaan dalam bentuk sterilisasi, pemasangan IUD, dalam program Keluarga Berencana dalam rangka mengendalikan kelahiran, istri dijadikan target mengontrol kelahiran sehingga istri menjadi korban. Meskipun banyak orang tahu bahwa persoalannya tidak hanya pada perempuan (istri) tetapi juga laki-laki (suami). Namun lantaran bias gender, perempuan dipaksa untuk melakukan walaupun sering kali membahayakan baik fisik ataupun mentalnya.

Dampak kekerasan Dalam Rumah tangga

Apabila kekerasan berlangsung terus-menerus dalam keluarga dapat berdampak negatif yaitu korban akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap istri ataupun anak dapat mengakibatkan kondisi yang berbahaya baik secara fisik misalnya bengkok, memar, patah tulang, pendarahan dll. Istri yang mengalami tindakan kekerasan dari suaminya yang berulang kali, akan mengalami perasaan tidak dapat ditolong dan tidak memiliki satu carapun untuk melindungi diri atau melarikan diri dari situasi tersebut. Akibat lain adalah yaitu perasaan malu, rendah diri, terhina dan terasing, akibat psikis ini akan lama dialami dan merupakan simptom psikis seperti munculnya depresi, sikap menyalahkan diri sendiri, dan menurunkan kemampuan mempercayai orang lain.

Hasil penelitian SEHATI dapat dijadikan contoh bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan adalah berdampak pada kesehatan perempuan. Perempuan yang punya pengalaman dianiaya secara fisik maupun seksual oleh suaminya dalam suatu waktu dalam hidupnya mempunyai kecenderungan lebih kecil untuk mengatakan kesehatannya "baik", dan lebih cenderung untuk mengatakan status kesehatannya "buruk" dari pada perempuan yang tidak teraniaya. Lebih jauh, mereka secara signifikan dilaporkan menderita lebih banyak pada tukak lambung, pusing, sakit dan nyeri, masalah perut dan nyeri perut bagian bawah (panggul) dari pada perempuan tanpa kekerasan. Selanjutnya dikatakan bahwa perempuan yang mempunyai pengalaman dengan berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual, apakah itu dilakukan oleh suaminya atau bukan, secara signifikan lebih cenderung bermaksud melakukan bunuh diri dalam suatu waktu hidupnya dari pada perempuan yang tidak teraniaya, walaupun tak seorang perempuanpun yang mau mengakui pernah mencoba bunuh diri. (Hakimi,dkk : 2001 :70).

Dengan demikian maka perlulah untuk memperhatikan secara serius bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga, antara lain dengan mencari jalan untuk mencegah berkembangnya perilaku kekerasan tersebut.

Antisipasi berkembangnya kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan diberi label-label (stereotip) tertentu berkaitan dengan peran gender mereka, seperti laki-laki gagah, perempuan lemah lembut, dan sebagainya. Citra tersebut dipertajam melalui berbagai macam cara dan sikap yang berbeda-beda sehingga menimbulkan keyakinan bahwa memang demikian kodrat laki-laki dan perempuan, termasuk keyakinan atau sikap yang memandang bahwa kedudukan perempuan (istri) adalah sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki sebagai makhluk yang kuat. Sehingga menimbulkan relasi yang timpang antara suami dan istri, dimana istri berada pada posisi sub-ordinat. Hal inilah yang salah satunya menimbulkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Padahal kodrat bukanlah demikian, kodrat adalah keadaan manusia yang tidak dapat diubah karena berasal dari ciptaan Tuhan, seperti perempuan hamil dan melahirkan.

Menyikapi bias gender tersebut, tentu harus dimulai dari rumah tangga terlebih dahulu. Adanya sikap kesetaraan gender pada laki-laki (suami), bahwa tidak ada pengkotak-kotakan peran secara kaku dalam relasi sosial, memungkinkan terjadinya hubungan/interaksi dalam keluarga lebih baik. Sikap terhadap kesetaraan gender suami bukan saja memaknai kehidupan keluarga lewat pembagian kerja semata, tetapi juga dalam pemberian akses terhadap perempuan dalam hal pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan kehidupan individu dan keluarganya. Sehingga tidak lagi memandang istri dalam posisi subordinat yang nota bene tidak berdaya, tetapi istri sebagai manusia yang mempunyai posisi setara dengan suaminya. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan hanya dipandang sebagai perbedaan biologis saja.

Untuk mengantisipasi berkembangnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang setara dalam keluarga baik antara suami, istri maupun anak. Aturan main dalam keluarga diputuskan bersama, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang dibuat oleh masyarakat. Dalam membentuk rumah tangga pada awalnya adalah kemauan antar laki-laki dan perempuan, yang mempunyai keunikan masing-masing. Dua pribadi yang disatukan dalam lembaga perkawinan tetap mempunyai perbedaan-perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak harus menimbulkan permasalahan ketidak-adilan. Pengalaman laki-laki dan perempuan dalam keluarga adalah berbeda, sehingga harus dikelola dengan baik yaitu dengan dialog/komunikasi yang seimbang. Melalui dialog yang mendalam, diharapkan keluarga dapat mengoreksi kesalahan ideologi gender yang mengkotak-kotakan manusia dari jenis kelamin. Manusia mempunyai perasaan, maka dalam keluarga diperlukan sikap saling menghargai.

Pendidikan terhadap perempuan tentang kesadaran akan hak-haknya, melalui pemberdayaan sehingga ada kesadaran bahwa kekerasan meru-

pakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu hal tersebut harus diperhatikan dengan tidak malu melaporkan pada pihak luar untuk mendapat pertolongan. Juga penyadaran bahwa permasalahan kekerasan bukan merupakan hal yang tabu untuk dicari solusinya melalui pihak lain, jika tidak dapat mengatasi sendiri sekarang telah ada beberapa lembaga yang peduli terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal pendidikan anak, karena anak merupakan buah cinta suami dan istri, maka pendidikan dan pengasuhan anak adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kehadiran anak bukanlah kehendaknya sendiri, ia lahir karena kehendak orang tua melalui ibunya. Anak adalah penerus generasi, namun posisi anak dalam struktur sub-ordinat. Posisi orang tua yang ordinat mempunyai potensi untuk menganggap anak sebagai yang tidak tahu dan harus tunduk. Hal ini juga merupakan bentuk kekerasan yang perlu mendapat perhatian agar orang tua tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Sedang dalam relasi bagi seluruh anggota keluarga diperlukan suasana demokratis yang mampu membangun keluarga harmonis. Istri dan anak perlu juga didengar pendapatnya dalam pengambilan keputusan didalam keluarga.

Selain membongkar masalah sosial yang sudah terstruktur tersebut melalui relasi setara antar anggota dalam rumah tangga. Perlu pula upaya strategis dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Karena kemauan keras dari tiap rumah tangga/keluarga, tidak akan mampu mengubah situasi apabila tidak ada kemauan politik. Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT), diperlukan mengingat keterbatasan produk hukum saat ini dalam menjawab persoalan kekerasan domestik yang kompleks, sehingga diperlukan produk hukum baru yang khusus. Dengan adanya Undang-Undang KDRT diharapkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud.

Sebenarnya rancangan Undang-Undang KDRT yang merupakan hak inisiatif DPR disahkan Badan Musyawarah DPR bulan Mei 2003. RUU KDRT itu perlu dibahas bersama pemerintah melalui departemen yang ditunjuk.

Kiranya tidak berlebihan bila pemerhati tentang masalah korban kekerasan dalam rumah tangga, boleh berbahagia karena dengan telah di tandatanganinya Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini oleh Presiden (Megawati), pada tanggal 22 September 2004, maka sah menjadi Undang Undang sebaga hukum positif yang wajib di taati oleh seluruh warga Negara Indonesia. Kita tinggal menunggu bagaimana sosialisasi Undang-Undang tersebut dan pelaksanaannya?, semoga dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, akan memperkecil peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud dalam rumah tangga.

Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan dampak dari ideologi gender, yang secara garis besar terjadi karena sistem budaya patriarkhi. Kedudukan timpang antara suami istri, dimana istri dalam posisi subordinat dan suami dalam posisi ordinat membuat hubungan/relasi dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis. Hampir semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh laki-laki dan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.

Kehidupan rumah tangga diyakini oleh masyarakat sebagai area yang tertutup, ada keengganan untuk membicarakan masalah domestik khususnya tentang kekerasan kepada pihak luar. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diketahui pihak luar.

Keluarga merupakan kelompok individu yang hidup bersama, relasi antar anggotanya dilakukan melalui komunikasi, merupakan syarat penting bagi kelancaran proses berelasi. Relasi yang baik akan dapat terwujud, apabila ada kesetaraan diantara anggota keluarga tersebut.

Kekerasan terstruktur merupakan akibat struktur yang tidak adil, upaya yang paling utama adalah memulai dari area keluarga, yaitu mengubah budaya yang tidak adil menjadi adil diantara anggota keluarga. Kemauan kuat bagi perempuan untuk berdaya, merupakan hal yang penting pula dalam menanggulangi kekerasan. Kesadaran sikap laki-laki

tantang kesetaraan gender akan turut membangun menurunnya tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender, Perempuan dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM, Indonesiatara*, Magelang, 2004.

Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga, Indonesiatara, Magelang, 2004

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Hakimi Mohammad, dkk, *Membisu Demi Harmoni*, LPKGM-FK-UGM, Yogyakarta, 2001

Kelompok Perempuan Sadar, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Gereja*, Publicio, Yogyakarta, 1996

Kompas, *Mendesak, Pengesahan UU Anti KDRT*, Jakarta, 4 Mei 2004

Kompas, *Presiden Dituntut Keluarkan Amanat tentang RUU Anti KDRT*, Jakarta, 1 Juni 2004.

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameepro, Jakarta, 2002